

“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGGUNAKAN HELM DALAM KETENTUAN UNDANG -UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”

Muhammad Jaini¹, Sudiyono², Abdul Hamid³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810246

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK. 0618041081

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIK. 061603881

Email:muhammadjaini15@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemakaian helm sepeda motor, proses penindakan pelanggaran lalu lintas, dan kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum pemakaian helm. Kajian dilakukan di Polres Jambi dengan menyeleksi instansi terkait untuk mendapatkan informasi secara detail tentang peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm pada sepeda motor roda dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulannya yaitu: Peran Polres Jambi dalam bidang hukum yaitu menegakkan hukum terhadap kewajiban penggunaan helm oleh semua pengendara sepeda motor melalui penegakan hukum yang bersifat preventif. Dengan kata lain, adanya tindakan preventif. Penindakan dari awal oleh polisi, dan pelanggaran lalu lintas untuk pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor. Upaya pencegahan membantu dengan sosialisasi dan pendidikan lalu lintas, dan memperingatkan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Penegakan hukum represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan atau pelanggaran. Selain menindak secara represif pelanggaran helm seperti: penindakan (ticketing);

Kata Kunci: Lalu Lintas, Helm.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Traffic Police in increasing legal awareness of the use of helmets for two-wheeled motorcycle drivers and the process of law enforcement against traffic violations and the obstacles faced by traffic police in increasing legal awareness of helmet use for wheeled motorcycle drivers. This research was conducted at the Jambi City Police by selecting the relevant agencies to obtain detailed information about the role of the Traffic Police in increasing legal awareness of the use of helmets for two-wheeled motorcycle drivers. This thesis uses a qualitative research approach and data collection techniques are Observation, Interview, Documentation . Based on the research conducted, the conclusions are as follows: that the role of the Jambi City Police in its legal area is to enforce the law against the obligation of every motorbike rider to use a helmet by means of Preventive Law Enforcement, namely the existence of preventive actions from the beginning by the police then traffic violations against traffic violations committed by motorized vehicles. Prevention efforts are to provide socialization and traffic education and provide warnings about the importance of obeying traffic signs. Repressive Law Enforcement is an action taken by law enforcement officers after a crime or violation has occurred. Along with law enforcement against violations of the obligation to wear helmets that are repressive, such as taking action (ticketing).

Keywords: Traffic, Helmet.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan).
- Ariman, Rasid dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. (2002). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta : Sinar Baru.
- Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT . Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kepolisian RI. *Standart Oprasional dan Prosudure Penanganan Kecelakaan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu-lintas*.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Maramis, Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Prints, Darwan. (2002). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin. (2002). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Truck System dan Implementasinya* . Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sianturi, S. R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta : Alumni.
- Soejono. (1996). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Tamanaha, Brian Z. (2006). *On The Role Of law*. New York : Cambrige University.
- Warsiti Hadi Utomo. H, *Hukum kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Persada Pustaka Publiser, 2005)
- Wiyanto, Romi. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Bandar Maju.

JURNAL & INTERNET

- Anonim. *Pengertian Menurut Para Ahli*.
www.pengertianmenurutparahali.com. diakses tanggal 17 Januari 2020.
- Antory Ryan Dyan. *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung*, vol. 7 No. 1, Januari 2012.
- Maladi, Yaris. 2010. *Eksistetensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, No. 3.
- Malik. *Menakar Keadilan Melalui Penyelesaian Sengketa Pidana di Luar Pengadilan*.
www.menakar-keadilan-melalui-penyelesaian-sengketa-diluar-pidana-diluar-pengadilan, diakases tanggal 17 Januari 2021
- Ni Putu Sri Widiasih. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Pengguna Helm di Universitas Haluoleo*. Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 2, No. 2

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu